

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Kota Surabaya terletak antara $7^{\circ} 9'$ - $7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36'$ – $112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya kurang lebih 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sukolilo Baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Tepatnya yang berada dipinggiran laut/selat Madura dengan luas lahan 1954.000 m² dan lebar jalan 8m. Kelurahan Sukolilo Baru juga merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bulak dan terdiri dari 7 RW dan 41 RT. Kelurahan memiliki batas wilayah, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Batas Wilayah Kelurahan Sukolilo Baru

No	Batas Wilayah	Batasan Kelurahan
1	Wilayah Utara	Kelurahan Kenjeran
2	Wilayah Timur	Laut / Selat Madura
3	Wilayah Selatan	Kelurahan Dukuh Sutorejo
4	Wilayah Barat	Kelurahan Gading

Sumber: Website Kelurahan Sukolilo Baru

4.2 Keadaan Demografi Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Jumlah penduduk Kelurahan Sukolilo Baru sebanyak 10.386 jiwa yang terdiri dari 3.342 Kartu Keluarga (KK). Keterangan lebih lanjutnya dapat dilihat dari data penduduk Kelurahan Sukolilo Baru di tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Sukolilo Baru

Data Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
WNI	5.078	5.308	10.386
WNA	0	0	0

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sukolilo Baru menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki.

4.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting pada era pembangunan seperti sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan penduduk wilayah Kelurahan Sukolilo Baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak / belum sekolah	1.450	1.455
2.	Belum tamat SD / sederajat	375	339
3.	Tamat SD / sederajat	829	1.041
4.	SLTP / sederajat	594	631
5.	SLTA / sederajat	1.389	1.337
6.	D1 / D2	77	44
7.	Akademi D3 / sarjana muda	134	118
8.	D4 / S1	566	623
9.	S2	54	35
10.	S3	3	1

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru Tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sukolilo Baru sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kelurahan Sukolilo Baru secara mayoritas telah menyangand pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kelurahan Sukolilo Baru.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sukolilo Baru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SMP / SLTP	1
2.	SMA / SLTA	1
3.	SD	5
4.	TK	4

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru

Dari tabel tersebut, ditunjukkan bahwa prasarana yang paling banyak adalah SD sebanyak 5 gedung, berikutnya adalah TK sebanyak 4 gedung. Sedangkan gedung SMP / SLTP sebanyak 1 gedung dan tingkatan SMA / SLTA memiliki gedung sebanyak 1.

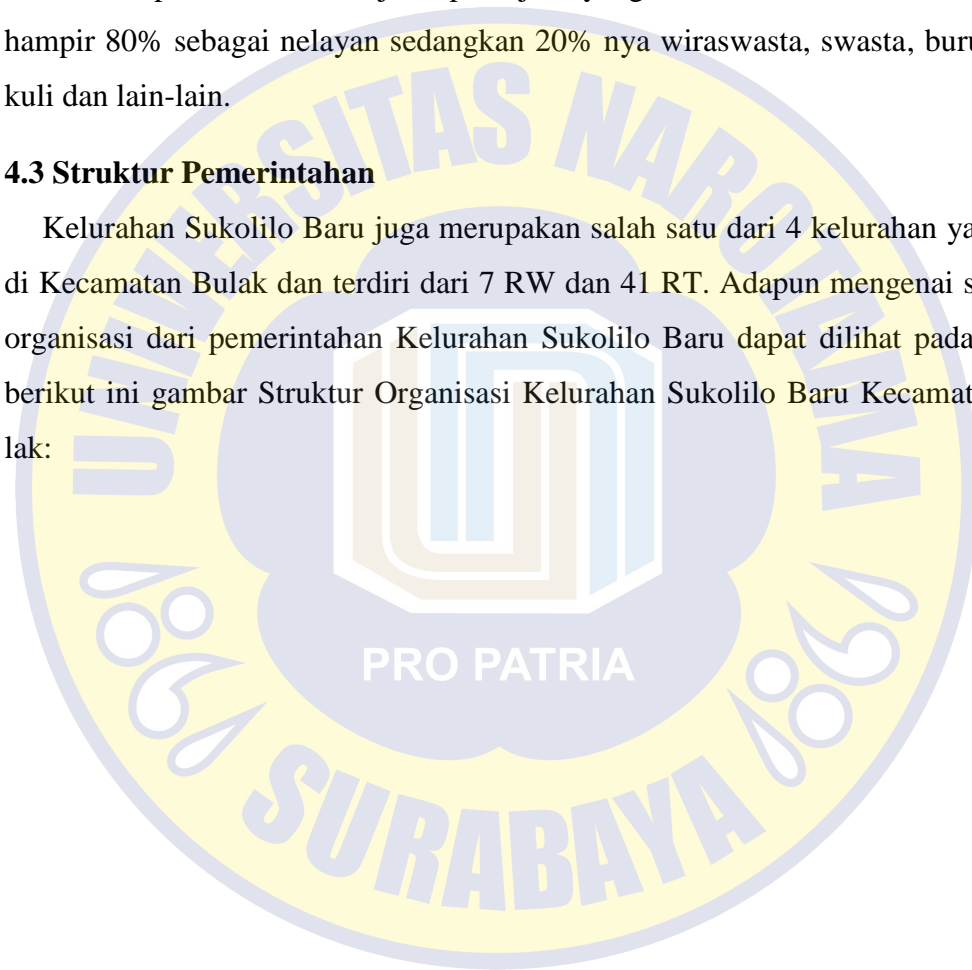
4.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

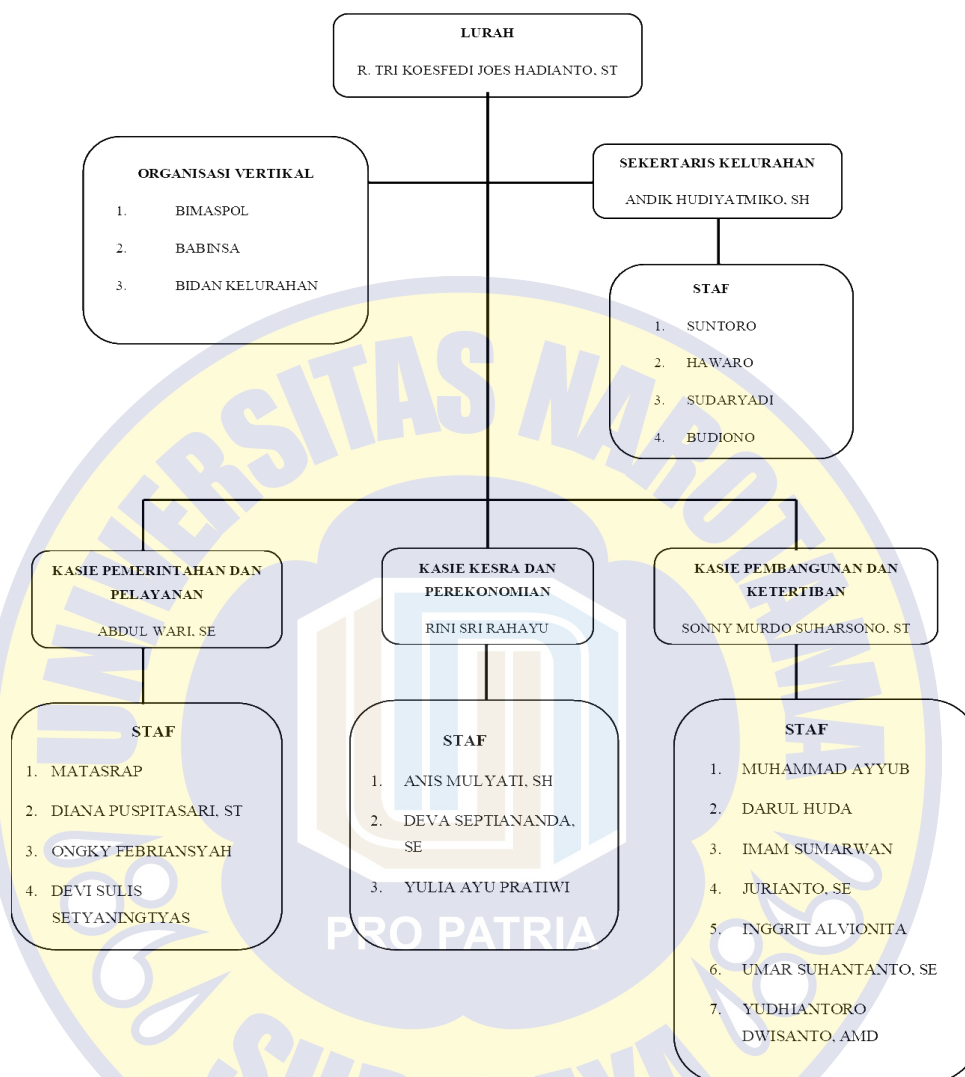
Mata pencaharian adalah usaha atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk membiayai serta memenuhi kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian seseorang berkaitan dengan kondisi sosial ekonominya, sehingga menjadi tolak ukur perilaku pribadi dalam kehidupannya

Mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Sukolilo Baru hampir 80% sebagai nelayan sedangkan 20% nya wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain.

4.3 Struktur Pemerintahan

Kelurahan Sukolilo Baru juga merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bulak dan terdiri dari 7 RW dan 41 RT. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kelurahan Sukolilo Baru dapat dilihat pada bagan berikut ini gambar Struktur Organisasi Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak:





Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sukolilo Baru

4.3.1 Tugas dan Fungsi Lurah

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut lurah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat

3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kelurahan

Dalam menjalankan tugasnya lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab pada lurah. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kelurahan yaitu:

a. Sekretaris Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesekretariatan yang meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan kelurahan.
2. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan.
5. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.
7. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan.
8. Melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah Kelurahan.
9. Melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat.
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Melaksanakan administrasi pertanahan.
3. Melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi.
4. Melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan.
5. Melaksanakan program di bidang pemerintahan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan.
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kasie Kesra dan Perekonomian

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang meliputi:

1. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin.
 4. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja.
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
 6. Melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.
 7. Melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.
 8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.
 9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.
 10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Kasi Pembangunan dan Ketertiban

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan yang meliputi:

1. Membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik Daerah.
5. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
6. Melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum.
7. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang pekerjaan umum dan pematuan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.
9. Melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
10. Melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
11. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3 Visi dan Misi Kelurahan Sukolilo Baru

Visi:

Menuju Sukolilo Baru kawasan wisata dengan kemandirian dan etos kerja yang bermanfaat.

Misi:

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan Sukolilo Baru sebagai kawasan wisata.
- b. Meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah, cepat dan nyaman.
- c. Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, hijau dan nyaman.
- d. Mewujudkan masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru yang berkarakter pancasila.
- e. Meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMK Kelurahan Sukolilo Baru.
- f. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bidang perberdayaan.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru

Peneliti menyadari bahwa PBB adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memperluas sumber PAD. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan membayar PBB, masyarakat diharapkan mampu melakukannya. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan, masyarakat yang memiliki objek pajak dituntut untuk segera membayar pajaknya tepat waktu. Meskipun masih sulit untuk mewujudkannya karena berbagai kendala, namun penerimaan daerah dari sektor PBB di Kelurahan Sukolilo Baru perlu ditingkatkan untuk dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa realisasi PBB di Kelurahan Sukolilo Baru selama tahun 2020-2021 belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berikut data realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Sukolilo Baru.

Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pembayaran PBB Tahun 2019-2022 Di Kelurahan Sukolilo Baru

Tahun	Target	Realisasi	%
--------------	---------------	------------------	----------

2019	1.602.303.623	1.554.234.514,31	97
2020	1.602.303.623	961.382.173,8	60
2021	1.602.303.623	1.121.612.536,1	70
2022	1.602.303.623	1.570.257.550,54	98

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan data yang diambil berasal dari petugas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sukolilo Baru, pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan yang seharusnya dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo namun hanya mencapai target 60% yaitu Rp.961.382.173,8 dari total target sebesar Rp.1.602.303.623 Kelurahan Sukolilo Baru memiliki potensi yang cukup besar namun target penerimaannya masih belum tercapai. Terkait penurunan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Untuk antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi sangat kurang tetapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat antusias karena setiap tahunnya hampir memenuhi target. Sedangkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru tahun 2020 hanya 60% dikarenakan terdampak covid-19.”

Setiap tahun, bulan Februari terlihat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dibagikan ke setiap Kelurahan, dua minggu setelah itu diberikan ke masing-masing RW untuk dibagikan ke masyarakatnya. Mengenai kegiatan jemput bola yang dilakukan petugas, kasie pemerintahan dan pelayanan publik menambahkan bahwa:

“Setiap tahun ada 4 kali melakukan jemput bola. Dan denda administrasi sebesar 25% per tahun jika terlambat membayar.”

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sukolilo Baru juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian

ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan serta pekerjaan dan penghasilan.

4.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

1. Faktor usia

Usia adalah faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap aktivitas-aktivitas kemasyarakatan di lingkungan sosial. Faktor usia juga turut melibatkan cara berpikir seseorang untuk menaikkan kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari. Kategori usia dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai produktifitasnya. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Oleh sebab itu, seorang masyarakat wajib pajak yang usianya termasuk dalam kelompok umur menengah ke atas diklaim telah lebih produktif dan mempunyai pola pikir yang matang. Maksudnya, setiap wajib pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak menggunakan pola pikir matang yang dimiliki, diharapkan akan semakin bertambah juga pemahaman masyarakat wajib pajak tersebut terhadap kewajibannya membayar PBB setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukolilo Baru, faktor usia dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar pajak. Seperti tanggapan yang diberikan oleh ibu Ponirah, bahwa:

“Masyarakat yang aktif membayar PBB dengan yang telat membayar PBB bisa dilihat dari kegiatan sehari-harinya. Biasanya bukan karena tidak mau tetapi mereka sibuk, apalagi yang sudah tua biasanya gak punya banyak waktu. Bayar PBB itu kan langsung ke Bank atau ke ATM”.

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat tersebut bahwa yang usianya termasuk dalam kelompok usia produktif dapat menjadi faktor penentu dari tinggi atau rendahnya minat seorang ikut berpartisipasi membayar pajak. Walaupun masyarakat cenderung membayar pajak hanya ketika perlu saja, tetapi biasanya orang yang sudah tua menjadi lebih acuh terhadap pentingnya membayar pajak.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dijadikan tolak ukur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Asmaul Khusnah, mengatakan bahwa:

“Ada perbedaan pemahaman antara orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi sama orang yang pendidikannya rendah. Karena makin tinggi tingkat pendidikannya, maka pengetahuannya juga pasti akan makin luas dan pemahaman terhadap pentingnya bayar PBB juga makin meningkat. Tapi, walaupun begitu gak menutup kemungkinan kalau di Kelurahan Sukolilo Baru ini yang berpendidikan pun malas membayar pajak.”

Walaupun tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat, kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak juga turut mempengaruhi. Di Kelurahan Sukolilo Baru masih ada beberapa masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikannya tidak tamat SMA, tetapi kesadaran diri untuk membayar pajak masih rendah. Terkait hal tersebut kasi pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat disini SD – SMP tetapi antusias dalam membayar PBB ada”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, khususnya PBB sangat diperlukan. Sosialisasi idealnya dilakukan langsung melalui pertemuan dengan sekelompok masyarakat wajib pajak guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak yang biasa dilakukan Kelurahan Sukolilo Baru berupa pemasangan baliho di jalan tentang ajakan kepada masyarakat agar segera membayar tagihan PBB. Namun, di

Pemerintah Kota Surabaya sudah lama tidak melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat-masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru. Menanggapi hal tersebut, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Sudah diadakan sosialisasi dari Kelurahan Sukolilo Baru sendiri tetapi antusias dari masyarakatnya kurang.”

Dengan demikian, peran Lurah dianggap sangat berpengaruh bila tegas menyikapi masyarakat yang belum membayar pajak. Masyarakat wajib pajak yang tidak tahu pentingnya membayar pajak merasa lebih aman dengan tidak melunasi PBB karena dibiarkan begitu saja.

3. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Setiap orang memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. Ada beberapa orang yang pendapatannya tinggi, sedang dan rendah. Maka dari itu, faktor pekerjaan dan penghasilan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat membayar pajak.

Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru mengaku banyak yang dari mereka bekerja sebagai nelayan. Bahkan ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai kuli atau buruh agar dapat upah untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya mereka bekerja apa saja yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Beberapa masyarakat berjualan di kedai kelontong depan rumah, menjual gorengan dan berjualan hasil lau. Menanggapi hal tersebut, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Mayoritas masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru ini 80% bekerja sebagai nelayan dan sisanya 20% bekerja sebagai wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain”.

Oleh karena itu, jenis pekerjaan dan penghasilan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dirinya dalam berpartisipasi membayar pajak.

4.4.3 Pembahasan

1. Cara Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Untuk meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat menjadi peran dan pertama dari masyarakat pada wilayah tersebut untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, pemikiran dan kepentingannya agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Perlu diadakan penyuluhan oleh kantor pelayanan PBB ataupun dari Kelurahan Sukolilo Baru itu sendiri untuk meningkatkan wawasan wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB yang dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya kepada petugas pemungut yang ditunjuk pada setiap desa. Sehingga masyarakat mengerti tentang cara menetapkan nilai objek pajak dan prosedur pembayaran.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ialah keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan *sistem office assessment*, seperti PBB. menjadi hasil pajak yang bisa meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan pada masyarakat itu sendiri.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas PBB di Kelurahan Sukolilo Baru peneliti menemukan beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

- a. Faktor Usia

Penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan factor yang turut cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola fikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

b. Faktor Pendidikan

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sukolilo Baru sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kelurahan Sukolilo Baru secara mayoritas telah menyangand pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kelurahan Sukolilo Baru.

Disisi lain, pendidikan menjadi tuntutan terhadap aparat atau petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya aa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran ajak yang telah ditetapkan tersebut.

c. Pekerjaan dan Penghasilan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup keluarganya, pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan social ekonomi akan menentukan prilaku individu

dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Sukolilo Baru hampir 80% sebagai nelayan sedangkan 20% nya wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditinjau bahwa faktor - faktor tersebut bisa mempengaruhi kesadaran diri masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru untuk ikut terlibat dalam meningkatkan sumber PAD di daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewajiban membayar pajak baik secara hukum Islam juga secara ketetapan aturan undang-undang.

Selain itu ada juga faktor kondisi sosial ekonomi dari jenis pekerjaan dan penghasilan yang didapat mengakibatkan pemikiran masyarakat menganggap bahwa mereka tidak menerima imbalan dari pajak tersebut secara langsung, melainkan digunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Oleh karena itu, pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pendapatan asli daerah yang menangani segala macam keperluan dan kebutuhan pajak bisa semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menyepelekan masalah pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Sukolilo Baru di tahun mendatang direncanakan akan melakukan program-program penyesuaian lainnya secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kota Surabaya adalah dengan menyerahkan semua objek pajak yang belum dibayar, terutama objek pajak yang berjumlah besar dan bernilai tinggi kepada pihak kejaksaan untuk ditagih.

Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti PBB, Pemerintah Kota Surabaya akan “mengikat” masyarakat dengan persyaratan bahwa dalam setiap pengurusan surat apa pun terkait pengurusan administrasi, baik di tingkat kelurahan mau-

pun kecamatan, wajib melampirkan bukti lunas PBB yang terbaru. Kemudian juga untuk membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada bukti lunas PBB. Terakhir, adanya kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menagih objek pajak bernilai tinggi yang belum terbayar.

